



Silpa APBD 2022 Rp 23 M



PENGANTAR - Wali Kota Pontianak Edi Kamtono hadir di Rapat Paripurna Pidato Pengantar Wali Kota Pontianak dalam penyampaian Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022, kemarin.

TRIBUNPONTIANAK/FIRDAUS



Ketua DPRD: Perencanaan Kurang Matang

PONTIANAK, TRIBUN

- DPRD Kota Pontianak menggelar rapat paripurna dengan agenda pidato wali kota tentang penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2022 di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kota Pontianak, Senin (19/6/23).

Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin menjelaskan usai penyampaian pidato Wali Kota pihaknya akan membahas dengan Badan Anggaran terkait apa saja yang menjadi kendala dan temuan BPK.

"Itu semua akan kami tanyakan kepada Pemkot Pontianak sudah sejauh mana penyelesaiannya untuk anggaran tahun 2022," ungkapnya.

Menurutnya, catatan-catatan apa yang harus dilakukan Pemkot Pontianak akan disampaikan pihaknya. Akhir bulan ini atau awal bulan depan rencananya akan digelar rapat paripurna Perda Pertanggungjawaban APBD 2022.

"Sebab setiap tahun angterdapat SILPA kurang lebih sejumlah Rp 30 M.

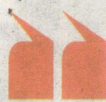
"Tahun 2021 tahun kemarin kalau tidak salah saya hampir Rp 30 M, artinya menurun," ungkapnya.

"Artinya sudah sangat baik, pasti ada SILPA tidak mungkin tidak ada, tapi ini kecil, nanti kita akan bicarakan di badan anggaran," pungkasnya.

Prioritaskan Keseimbangan

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan pidato rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2022 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, kemarin.

Dalam pemaparannya, Wako Edi menyampaikan sejumlah laporan realisasi anggaran (LRA) tahun 2022. Total pendapatan APBD Kota



Artinya kan kalau masih ada SILPA itu kan perencanaannya kurang matang, nanti kita akan tanyakan ke Pemkot Pontianak

Satarudin

Ketua DPRD Kota Pontianak

garan berakhir itu harus dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah," paparnya.

Lebih lanjut, Satar juga bilang, ada beberapa yang menjadi catatan pihaknya mengenai pelaksanaan APBD tahun 2022. Salah satunya adalah, dalam realisasi pelaksanaan APBD tahun 2022 ini masih terdapat sisa lebih pembayaran anggaran (SILPA) sebesar Rp 23 M.

Dalam penyampaian Wako Pontianak tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp 1,70 T.

Dari total APBD yang sejumlah Rp 1,70 T itu, realisasi belanja dan pembiayaan yang dilakukan oleh Pemkot Pontianak sepanjang tahun 2022 adalah sebesar Rp 1,66 T.

Wako Edi menerangkan, penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 ini berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat enam setelah tahun anggaran berakhir.

Hal itu sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 194 ayat 1. Laporan ini sebagai salah satu kewajiban Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kepada legislatif untuk dibahas pada rapat paripurna.

Edi tentang laporan realisasi anggaran (LRA) tahun 2022, total pendapatan APBD Kota Pontianak adalah sejumlah Rp 1,70 T. Dari total APBD yang sejumlah Rp 1,70 T itu, realisasi belanja dan pembiayaan yang dilakukan oleh Pemkot Pontianak sepanjang tahun 2022 adalah sebesar Rp 1,66 T.

Sehingga, masih terdapat SILPA sebesar Rp 23.003.757.216,43. "Catatan-catatan kami ada beberapa, saya akan bicarakan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Pontianak, nanti akan kita diskusikan, terkait masih ada SILPA, dan lain sebagainya," ucapnya.

"Artinya kan kalau masih ada SILPA itu kan perencanaannya kurang matang, nanti kita akan tanyakan ke Pemkot Pontianak," sambungnya.

Namun demikian, kata Satar lagi, jika dibandingkan tahun 2021 pelaksanaan APBD tahun 2022 jauh lebih baik. Pada pelaksanaan APBD tahun 2021, masih

■ Bersambung ke hal. 10

"Sebagian besar target tercapai, tetapi ada juga beberapa di antaranya belum tercapai," ujarnya.

Tahapan selanjutnya, kata dia, akan dilakukan pembahasan oleh DPRD Kota Pontianak yang nantinya akan disampaikan melalui pandangan umum fraksi-fraksi. Edi menambahkan, prioritas selanjutnya adalah menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja.

Pihaknya juga berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu, untuk meningkatkan PAD harus dilakukan inovasi dan terobosan.

"Sehingga alokasi anggaran belanja bisa langsung menyentuh masyarakat misalnya pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat di sektor UMKM dan lainnya," imbuhnya. (fir)